

Laporan Tahunan Konflik SDA Riau 2015

Disusun oleh Tim Scale Up – www.scaleup.or.id

4 Januari 2016

Komitmen Sustainability APP, APRIL, dan Wilmar Isapan Jempol; 2015 Konflik SDA Riau Masih Tinggi

Sejak 2013, perusahaan yang bergerak di industri bubur kertas dan kelapa sawit di Riau berlomba-lomba mengumumkan pada khalayak ramai tentang komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan penyelamatan hutan. Keberlanjutan di sini tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi namun juga ramah sosial dan menghormati Hak Asasi manusia. Perusahaan tersebut adalah APP Group dengan *Forest Conservation Policy* (FCP), APRIL Group dengan Sustainable Forest Manajement Policy 1 dan 2.0 (SFMP) dan Wilmar Group dengan Kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut dan Nol Eksploitasi.

Dalam Setiap kebijakan yang dikeluarkan masing – masing group tersebut menyebutkan bahwa dalam operasionalnya perusahaan akan menghormati Hak Asasi Manusia, Menghormati Hak-Hak Masyarakat, Menyelesaikan konflik dengan bertanggung jawab dan mengedepankan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC).

Poin-poin dalam kebijakan masing-masing group seharusnya dikomunikasikan secara umum baik internal maupun eksternal. Ini berarti bahwa masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan harus mendapatkan informasi tersebut secara utuh dan menyeluruh. Kebijakan itu seharusnya juga tercermin dalam setiap tingkah laku perusahaan dan diintegrasikan ke seluruh organ perusahaan. Informasi ini penting bagi masyarakat, sehingga ketika telah terjadi pelanggaran atau pengabaian hak masyarakat dapat mengetahui mekanisme pengaduan dan mekanisme penyelesaian persoalan tersebut dengan jelas.

Kondisi yang terjadi hingga saat ini perusahaan tidak dengan sungguh-sungguh menjalankan komitmen mereka. Scale Up masih menemukan proses penyelesaian konflik yang tidak mengedepankan prinsip-prinsip FPIC dan mengakomodir kepentingan masyarakat. Dalam proses penyelesaian konflik, tim perusahaan selalu mengedepankan kepentingan perusahaan dan memaksakan proses penyelesaian tersebut. Masyarakat sering tidak diberi kesempatan untuk memperoleh haknya. Dengan demikian konflik masih saja terus terjadi.

Berdasarkan rekaman data konflik sumber daya alam (SDA) Riau yang dikompilasi oleh Scale Up, diperoleh sejumlah fakta dan data sebagai berikut :

1. Jumlah titik konflik SDA Riau pada tahun 2015 :
 - 1.1. Sektor Kehutanan : $12 + 6 = 18$
 - 1.2. Sektor Perkebunan : $20 + 16 = 36$
 - 1.3. Sektor Pertambangan : -
 - 1.4. Tapal batas : 1

Total titik konflik : 55

2. Jumlah luasan konflik SDA Riau pada tahun 2015 :
 - 2.1. Sektor Kehutanan : ± 21266,15 ha + ± 20475 ha = ± 41741,15 ha
 - 2.2. Sektor Perkebunan : ± 33660 ha + ± 17478,8 ha = ± 51138,8 ha
 - 2.3. Sektor Pertambangan : -
 - 2.4. Tapal batas : -

Total titik konflik : ± 92879,95
3. Jumlah titik konflik tertinggi : Rokan Hulu (**9 titik**) dan Pelalawan (**9 titik**)
4. Jumlah luasan konflik tertinggi : Bengkalis (**± 25108,75 ha**)
5. Tipologi (aktor konflik) :
 - 5.1. Masyarakat versus Perusahaan : **47**
 - 5.2. Masyarakat versus Masyarakat : **6**
 - 5.3. Masyarakat versus Negara : **2**
 - 5.4. Perusahaan versus Negara : -
6. Aksi kekerasan yang terjadi akibat konflik SDA Riau selama tahun 2015 :
 - 6.1. **Warga Desa Lubuk Kembang Bunga, Kab. Pelalawan vs PT. Rimba Lazuardi** (Perkebunan):
 - 37 rumah dirusak dan 1 rumah masyarakat dibakar
 - 11 unit speeda motor masyarakat dibakar
 - 9 unit sepeda motor masyarakat dirusak
 - 6.2. **Warga Sungai Mandau, Kab. Siak vs Koperasi Olak Mandiri** (Perkebunan):
 - Pembakaran posko kebun kelapa sawit milik koperasi oleh masyarakat, dipicu oleh keributan di arena permainan bilyar
 - 6.3. **Warga Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalalawan vs PT. Nusa Wana Raya** (Kehutanan) :
 - Perusahaan melakukan pengrusakan terhadap kebun kelapa sawit milik masyarakat
 - 6.4. **Warga Desa Salo dan Desa Kuok, Kab. Kampar vs PTPN V** (Perkebunan) :
 - Warga diserang oleh satgas dari perusahaan BUMN itu karena demo menuntut lahan ulayat yang diambil perusahaan
 - 6.5. **Warga Desa Sencalang Rengat, Kab. Indragiri Hulu vs PT. Panca Argo Lestari** (Perkebunan) :
 - Terjadi pembacokan terhadap seorang aparat kepolisian oleh warga desa saat terjadi demo klaim lahan oleh masyarakat
7. Sejumlah perusahaan milik **APP Group** pada tahun 2015 masih berkonflik dengan masyarakat, padahal perusahaan besar sektor kehutanan ini telah berkomitmen untuk zero deforestation dan sustainability. Berikut perusahaannya :
 - **PT. Arara Abadi**, berkonflik dengan masyarakat asli Suku Sakai di Kec. Pinggir Kab. Bengkalis

- **PT. Arara Abadi**, berkonflik dengan warga Dusun Solok Bongkal, Desa Koto Pait Beringin, Kab. Bengkalis
- **PT. IKPP**, berkonflik dengan warga Desa Pinang Sebatang Barat, Kab. Siak Sri Indrapura
- **PT Arara Abadi**, berkonflik dengan warga Doral Kampung Dosan, Kab. Siak Sri Indrapura
- **PT. Arara Abadi**, berkonflik dengan warga Minas Barat, Kab. Siak Sri Indrapura
- **PT. Arara Abadi**, berkonflik dengan warga Suku Sakai Minas Asal, Kab. Siak Sri Indrapura
- **PT. Arara Abadi**, berkonflik dengan warga Desa bunut, Kab. Pelalawan
- **PT. Arara Abadi**, berkonflik dengan warga Pulau Muda Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan

8. Perusahaan milik **APRIL** :

- **PT. Sumatera Silva Lestari**, berkonflik dengan warga desa Sei Kumango, Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu
- **PT. Sumatera Riang Lestari**, berkonflik dengan warga Bayas Jaya dan desa lainnya, Kec. Tempuling, Kab. Indragiri Hilir
- **PT. Nusa Wana Raya**, berkonflik dengan masyarakat Desa Segati Dusun Tasik Indah, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan
- **PT. Sumatera Riang Lestari**, berkonflik dengan masyarakat Desa Titi Akar, Kab. Bengkalis
- **PT. RAPP**, berkonflik dengan warga Desa Anak Kamal, Mekar Sari dan Pelantai Lukit, Kab. Kep. Meranti
- **PT. RAPP**, berkonflik dengan kelompok Tani Sakato Basamo (SKB), Kab. Kuantan Singingi

Konflik berkepanjangan yang terjadi setiap tahun di Riau tak lepas dari peranan pemerintah. Dalam pengelolaan SDA, pemerintah belum mengakomodir hak-hak masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah cenderung pro terhadap investasi saja. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi sulit untuk pro aktif dalam pengelolaan SDA bahkan yang telah menjadi haknya secara turun temurun. Untuk itu Scale Up memandang perlu untuk memberikan sejumlah rekomendasi sebagai berikut :

1. Pembentukan lembaga penyelesaian konflik di tingkat daerah (propinsi maupun kabupaten);
2. Membangun strategi penyelesaian konflik bersama parapihak;
3. Adanya peraturan yang membatasi perizinan skala besar;
4. Adanya kebijakan yang memastikan ruang kelola (tata ruang) bagi masyarakat adat/lokal;
5. Mengembangkan program pembangunan yang berorientasi pada ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

Contact Person :

Scale Up – Jois : 081266391234 / Mamay : 082390437227
Email : infoscaleup@yahoo.com